

JARING PENGAMAN SOSIAL BERBASIS KARAKTERISTIK WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF PROVINSI JAWA BARAT

RR TINi ANGGRAENI



PROGRAM STUDI ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH PEDESAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Analisis Peran Dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) Berbasis Karakteristik Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2026

Rr Tini Anggraeni
NRP H0601201007

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

RINGKASAN

RR TINI ANGGRAENI. Jaring Pengaman Sosial Berbasis Karakteristik Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Barat. Dibimbing oleh HERMANTO SIREGAR, BAMBANG JUANDA dan IRFAN SYAUQI BEIK.

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk menganalisis pola persebaran dan efek spasial Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), menganalisis kontribusi PKH, PIP, dan zakat berdasarkan karakteristik wilayah terhadap pembangunan ekonomi inklusif, serta merumuskan strategi optimalisasi JPS yang sesuai dengan karakteristik kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan terintegrasi melalui Global Moran's I dan Local Indicators of Spatial Association (LISA) untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan spasial, Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) untuk menganalisis heterogenitas pengaruh JPS dan karakteristik wilayah, serta Analytic Network Process (ANP) untuk menentukan prioritas strategi optimalisasi JPS. Integrasi ketiga pendekatan tersebut memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berbasis karakteristik wilayah.

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa pola pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Barat berbeda antarwilayah dan antar dimensi. Pilar 1, yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi, menunjukkan autokorelasi spasial positif dan signifikan secara konsisten, yang berarti terdapat kecenderungan pengelompokan wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif serupa. Kluster pertumbuhan tinggi terutama ditemukan pada kawasan metropolitan, industri, perdagangan, dan pusat jasa, sedangkan kluster pertumbuhan rendah cenderung berada pada wilayah rural dan perifer. Pola tersebut menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas ekonomi sekaligus mengindikasikan potensi *spillover effect* dari pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah sekitarnya. Sebaliknya, Pilar 2, yaitu Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan, menunjukkan kecenderungan autokorelasi spasial positif tetapi secara global tidak signifikan, sedangkan Pilar 3, yaitu Perluasan Akses dan Kesempatan, secara umum memiliki autokorelasi spasial yang lemah dan mayoritas tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik internal dan kapasitas masing-masing wilayah.

Pada sisi distribusi JPS, hasil Global Moran's I menunjukkan bahwa PKH, PIP, dan zakat secara umum tidak memiliki autokorelasi spasial global yang kuat dan signifikan. Dengan demikian, pola penyaluran ketiga instrumen tersebut cenderung heterogen dan lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, jumlah dan karakteristik penerima manfaat, mekanisme penargetan, serta kapasitas kelembagaan masing-masing daerah daripada semata-mata kedekatan geografis. Meskipun demikian, analisis LISA berhasil mengidentifikasi pola lokal *High-High* (HH), *Low-Low* (LL), *High-Low* (HL), dan *Low-High* (LH), yang menunjukkan adanya konsentrasi maupun ketimpangan penyaluran JPS pada wilayah tertentu. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun keterkaitan spasial JPS secara global relatif lemah, pada tingkat lokal tetap terdapat pola-pola spasial yang penting sebagai dasar penentuan wilayah prioritas kebijakan.

Analisis selanjutnya menggunakan GWPR menunjukkan bahwa model lokal memiliki kemampuan dalam menangkap variasi pengaruh antarwilayah, sehingga menegaskan bahwa kontribusi JPS dan karakteristik wilayah terhadap Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3, dan IPEI tidak bersifat seragam secara spasial. PKH secara umum lebih berperan sebagai instrumen perlindungan sosial, terutama dalam menjaga konsumsi dan mengurangi kerentanan rumah tangga miskin. Oleh karena itu, pengaruh langsung PKH terhadap pertumbuhan ekonomi relatif terbatas, tetapi perannya lebih relevan dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan perluasan akses terhadap layanan dasar pada wilayah tertentu. PIP berperan sebagai instrumen investasi modal manusia melalui peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan, terutama pada wilayah yang menghadapi keterbatasan pendidikan dan kesempatan ekonomi. Sementara itu, zakat memiliki fungsi ganda sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi, khususnya apabila penyalurannya diarahkan secara produktif dan didukung oleh kapasitas kelembagaan zakat yang kuat.

Efektivitas PKH, PIP, dan zakat tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing wilayah, antara lain tingkat kemiskinan, konsumsi, investasi, kapasitas fiskal, kondisi pendidikan, infrastruktur, aksesibilitas, luas wilayah, urbanisasi, dan kapasitas kelembagaan lokal. Integrasi hasil Global Moran's I, LISA, dan GWPR juga mengindikasikan adanya potensi spillover effect pembangunan ekonomi inklusif dengan intensitas yang berbeda antarwilayah, terutama pada kawasan yang memiliki keterkaitan ekonomi dan aglomerasi kuat, termasuk wilayah yang terhubung dengan pusat pertumbuhan di sekitar DKI Jakarta. Namun, manfaat *spillover* tidak terjadi secara otomatis dan merata karena sangat bergantung pada kemampuan masing-masing wilayah dalam menyerap manfaat pertumbuhan melalui kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, konektivitas, dan kapasitas kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menjamin terjadinya penyebaran manfaat pembangunan.

Berdasarkan heterogenitas spasial tersebut, penelitian selanjutnya merumuskan strategi optimalisasi JPS menggunakan Analytic Network Process (ANP). Hasil ANP menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan menjadi kriteria pembangunan ekonomi inklusif yang memperoleh prioritas tertinggi dengan bobot 0,4126. Pada tingkat alternatif strategi, prioritas utama adalah pengoptimalan regulasi dan dukungan pemerintah (0,2476), diikuti pengembangan program pelayanan sosial yang integratif (0,2082), penguatan sinergi antar-stakeholder (0,2007), pengawasan dan pembinaan (0,1862), serta peningkatan inklusivitas (0,1573). Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas JPS tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas regulasi, integrasi program, koordinasi kelembagaan, pengawasan, dan kemampuan program dalam meningkatkan kapasitas penerima manfaat.

Pada tingkat subalternatif, integrasi data DTKS/DTSN, Dapodik, dan data mustahik zakat menjadi prioritas tertinggi dengan bobot 0,1354, diikuti penentuan kriteria penerima manfaat (0,1271) dan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (0,0948). Integrasi data menjadi fondasi penting untuk meningkatkan akurasi penargetan, mengurangi *inclusion error* dan *exclusion error*, mencegah tumpang tindih penerima, serta memastikan PKH, PIP, dan zakat berfungsi secara komplementer. Rumah tangga miskin dapat memperoleh PKH sebagai perlindungan

kebutuhan dasar, PIP untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak, serta zakat, khususnya zakat produktif, untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian keluarga. Dengan demikian, JPS dapat dikembangkan sebagai suatu rangkaian intervensi yang bergerak dari perlindungan sosial, peningkatan kapabilitas, hingga pemberdayaan ekonomi.

Integrasi hasil analisis spasial, GWPR, dan ANP pada akhirnya menegaskan perlunya perubahan paradigma pengelolaan JPS dari pendekatan yang seragam menuju kebijakan berbasis karakteristik wilayah (*place-based policy*). Setiap kabupaten/kota membutuhkan kombinasi intervensi yang berbeda sesuai dengan tingkat kemiskinan, kondisi pendidikan, struktur ekonomi, pengangguran, urbanisasi, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaannya. Wilayah dengan kemiskinan tinggi dan akses pendidikan rendah, misalnya, membutuhkan kombinasi PKH, PIP, dan zakat konsumtif; wilayah dengan pengangguran tinggi dan sektor informal dominan dapat lebih diarahkan pada kombinasi perlindungan sosial dan zakat produktif; sedangkan wilayah perkotaan dengan kantong kemiskinan membutuhkan penguatan pendidikan, keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi produktif.

Hasil akhir penelitian kemudian menghasilkan Model Tata Kelola Jaring Pengaman Sosial Berbasis Karakteristik Wilayah yang mengintegrasikan pendekatan *Collaborative Governance*, *Integrated Social Protection*, dan analisis spasial GWPR. Model ini menekankan pentingnya *leading institution* dan koordinasi lintas sektor, integrasi basis data sosial, pendidikan, kependudukan, dan zakat, pemanfaatan GWPR sebagai *decision support system*, penguatan forum koordinasi JPS pusat dan daerah, penerapan intervensi adaptif berdasarkan tipologi wilayah, serta monitoring dan evaluasi terintegrasi. Model tersebut membentuk suatu siklus tata kelola adaptif (*adaptive governance cycle*) yang memungkinkan kebijakan terus diperbaiki berdasarkan perubahan kondisi masyarakat dan hasil evaluasi program.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas JPS dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi terutama oleh ketepatan sasaran, karakteristik wilayah, integrasi data dan program, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antar-*stakeholder*. PKH perlu diperkuat sebagai instrumen perlindungan sosial dan peningkatan kapabilitas rumah tangga miskin, PIP sebagai investasi modal manusia jangka panjang, dan zakat sebagai instrumen redistribusi sekaligus pemberdayaan ekonomi produktif. Ketiga instrumen tersebut perlu diintegrasikan dalam tata kelola yang kolaboratif dan berbasis bukti agar JPS tidak hanya berfungsi sebagai *safety net* yang melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi, tetapi juga berkembang menjadi springboard yang mendorong kemandirian dan mobilitas ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, JPS diharapkan mampu berkontribusi secara lebih optimal terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses dan kesempatan, penguatan produktivitas masyarakat, serta terwujudnya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

SUMMARY

Rr Tini Anggraeni, The Effects of Regional Characteristics-Based Social Safety Net Funds on Inclusive Economic Growth in West Java Province. Supervised by Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, and Prof. Dr. Ir. Irfan Syauqi Beik.

This study aims to analyze the spatial distribution and spatial effects of the Inclusive Economic Development Index (IEDI) and Social Safety Net (SSN) programs, examine the contribution of the Family Hope Program (PKH), Smart Indonesia Program (PIP), and zakat based on regional characteristics to inclusive economic development, and formulate strategies for optimizing SSN programs in accordance with the characteristics of regencies and cities in West Java Province. To achieve these objectives, the study employs an integrated methodological approach consisting of Global Moran's I and Local Indicators of Spatial Association (LISA) to identify spatial patterns and interregional linkages, Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) to analyze spatial heterogeneity in the effects of SSN programs and regional characteristics, and the Analytic Network Process (ANP) to determine strategic priorities for optimizing SSN programs. The integration of these three approaches provides an empirical foundation for formulating social protection policies that are more accurately targeted and responsive to regional characteristics. The spatial analysis reveals that inclusive economic development in West Java exhibits different patterns across regions and dimensions. Pillar 1, Economic Growth and Development, consistently demonstrates positive and significant spatial autocorrelation, indicating a tendency for regions with similar levels of economic growth to cluster geographically. High-growth clusters are primarily concentrated in metropolitan, industrial, trade, and service centers, while low-growth clusters tend to be located in rural and peripheral areas. This pattern reflects the concentration of economic activity and indicates the potential for *spillover effects* from growth centers to surrounding regions. In contrast, Pillar 2, Income Equality and Poverty Reduction, exhibits a tendency toward positive but globally insignificant spatial autocorrelation, while Pillar 3, Expansion of Access and Opportunities, generally shows weak and mostly insignificant spatial autocorrelation. These findings indicate that income distribution, poverty reduction, and access to education, health care, and economic opportunities are more strongly influenced by the internal characteristics and capacities of individual regions.

Regarding the spatial distribution of SSN programs, the Global Moran's I results indicate that PKH, PIP, and zakat generally do not exhibit strong and significant global spatial autocorrelation. Thus, the distribution of these three instruments tends to be spatially heterogeneous and is influenced more by socioeconomic conditions, the number and characteristics of beneficiaries, targeting mechanisms, and the institutional capacity of each region than by geographical proximity alone. Nevertheless, the LISA analysis identifies local patterns of *High-High* (HH), *Low-Low* (LL), *High-Low* (HL), and *Low-High* (LH), indicating spatial concentrations and disparities in SSN distribution across particular regions. These findings demonstrate that although the global spatial interdependence of SSN programs is relatively weak, important local spatial patterns remain and can serve as a basis for identifying priority areas for policy intervention.

The subsequent GWPR analysis demonstrates that the local model is capable of capturing variations in effects across regions, confirming that the contributions of SSN programs and regional characteristics to Pillar 1, Pillar 2, Pillar 3, and the overall IEDI are spatially heterogeneous rather than uniform. PKH primarily serves as a social protection instrument, particularly by maintaining household consumption and reducing the vulnerability of poor households. Consequently, its direct contribution to economic growth is relatively limited, while its role is more relevant to poverty reduction and the expansion of access to basic services in certain regions. PIP functions as a human capital investment instrument by improving access to and continuity of education, particularly in regions facing limited educational access and economic opportunities. Meanwhile, zakat performs a dual function as an instrument of welfare redistribution and economic empowerment, particularly when its distribution is oriented toward productive activities and supported by strong zakat management institutions.

The effectiveness of PKH, PIP, and zakat is strongly influenced by regional characteristics, including poverty levels, household consumption, investment, fiscal capacity, educational conditions, infrastructure, accessibility, geographical size, urbanization, and local institutional capacity. The integration of Global Moran's I, LISA, and GWPR results also indicates the potential for spillover effects on inclusive economic development, with varying intensities across regions, particularly in areas characterized by strong economic linkages and agglomeration, including regions connected to growth centers surrounding Jakarta. However, spillover benefits do not occur automatically or uniformly, as they depend heavily on each region's capacity to absorb the benefits of growth through human capital quality, infrastructure, investment, connectivity, and institutional capacity. These findings confirm that geographical proximity alone is insufficient to ensure the diffusion of development benefits.

Based on this spatial heterogeneity, the study subsequently formulates strategies for optimizing SSN programs using the Analytic Network Process (ANP). The ANP results indicate that poverty and inequality reduction is the highest-priority criterion for inclusive economic development, with a weight of 0.4126. At the strategic alternative level, the highest priority is optimizing regulations and government support (0.2476), followed by developing integrated social service programs (0.2082), strengthening stakeholder synergy (0.2007), monitoring and capacity building (0.1862), and enhancing inclusiveness (0.1573). These findings indicate that the effectiveness of SSN programs is determined not only by the amount of assistance provided but also by the quality of regulations, program integration, institutional coordination, monitoring mechanisms, and the capacity of programs to enhance beneficiaries' capabilities.

At the sub-strategy level, the integration of DTKS/DTSEN, Dapodik, and zakat beneficiary (mustahik) databases emerges as the highest priority, with a weight of 0.1354, followed by determining beneficiary eligibility criteria (0.1271) and strengthening synergy between central and local governments (0.0948). Data integration provides an essential foundation for improving targeting accuracy, reducing *inclusion* and *exclusion errors*, preventing beneficiary overlap, and ensuring that PKH, PIP, and zakat function in a complementary manner. Poor households can receive PKH to protect their basic needs, PIP to ensure the continuity of their children's education, and zakat—particularly productive zakat—to

strengthen household economic capacity and self-reliance. Accordingly, SSN programs can be developed as a continuum of interventions that progresses from social protection and capability enhancement to economic empowerment.

The integration of spatial analysis, GWPR, and ANP ultimately highlights the need for a paradigm shift in SSN management from a uniform approach toward a place-based policy framework. Each regency or city requires a different combination of interventions according to its poverty level, educational conditions, economic structure, unemployment, urbanization, infrastructure, and institutional capacity. Regions characterized by high poverty and limited educational access, for example, may require a combination of PKH, PIP, and consumptive zakat; regions with high unemployment and a dominant informal sector may benefit more from a combination of social protection and productive zakat; while urban areas with pockets of poverty require stronger interventions in education, skills development, and productive economic empowerment.

The final outcome of this study is the development of a Regional Characteristics-Based Social Safety Net Governance Model, which integrates the approaches of *Collaborative Governance*, *Integrated Social Protection*, and GWPR-based spatial analysis. The model emphasizes the importance of a *leading institution* and cross-sectoral coordination, the integration of social, educational, population, and zakat databases, the utilization of GWPR as a *decision support system*, the strengthening of national and regional SSN coordination forums, the implementation of adaptive interventions based on regional typologies, and integrated monitoring and evaluation. Together, these components form an adaptive governance cycle that enables policies to be continuously improved in response to changing socioeconomic conditions and program evaluation results.

Overall, this study concludes that the effectiveness of SSN programs in supporting inclusive economic development is determined not merely by the amount of funds distributed, but more importantly by targeting accuracy, regional characteristics, data and program integration, institutional capacity, and coordination among stakeholders. PKH should be strengthened as an instrument of social protection and capability enhancement for poor households, PIP as a long-term investment in human capital, and zakat as an instrument of redistribution and productive economic empowerment. These three instruments should be integrated within a collaborative and evidence-based governance framework so that SSN programs can move beyond their conventional function as a *safety net* protecting vulnerable groups from economic shocks and evolve into a springboard that promotes economic self-reliance and upward mobility. Through this approach, SSN programs are expected to contribute more effectively to reducing poverty and inequality, improving human capital, expanding access and opportunities, strengthening community productivity, and ultimately achieving more inclusive, equitable, and sustainable economic development across all regencies and cities in West Java Province.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

©Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak Sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Penguji Luar Komisi Pembimbing pada Ujian Tertutup Disertasi

1. Assoc Prof Dr Muhammad Findi, S.E., M.E
2. Prof Dr Muhammad Arief Mufraini, M.Si

Penguji Luar Komisi Pembimbing pada Sidang Promosi Terbuka Disertasi

1. Assoc Prof Dr Muhammad Findi, SE., M.E
2. Prof. Dr. Muhammad Arief Mufraini, M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Judul Disertasi : Jaring Pengaman Sosial Berbasis Karakteristik Wilayah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Jawa Barat

Nama : Rr Tini Anggraeni

NIM : H0601201007

Disetujui oleh

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec



Pembimbing 2

Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, M.S



Pembimbing 3

Prof. Dr. Ir Irfan Syauqi Beik, SP, M.Sc, Ec



Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc

NIP. 19620421 198603 1 003



Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc, Ec

NIP : 19790422 200604 1 002



Tanggal Ujian

26 Juni 2026

Tanggal Ujian

27 Juli 2026

Tanggal Pengesahan 31 JUL 2026

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga disertasi dengan judul “Strategi Kebijakan *Free Trade Zone* (FTZ) Terhadap Pengembangan Wilayah Studi Kasus Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2021” ini dapat diselesaikan.

Penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungannya dalam proses penyelesaian disertasi ini, terutama kepada:

1. Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec; Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, M.Scr; dan Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec; yang telah membimbing dan memberi saran serta motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.
2. Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD), Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc; Sekretaris Prodi PWD, Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si, beserta seluruh staf pengajar PWD, yang telah memberikan banyak inspirasi, serta staf administrasi terutama Mba Puput dan Mba Nindy yang telah membantu dalam administrasi studi.
3. Dosen penguji kualifikasi lisan yang juga bertindak sebagai penguji luar komisi pada ujian tertutup dan sidang promosi terbuka Dr Muhammad Findi Alexandi dan Prof. Dr. M Arief Mufraini, M.Si yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan disertasi ini.
4. Pimpinan sidang ujian tertutup Dr. Ir Wita Juwita, S.TP., MM yang telah mengawal jalannya sidang, sehingga Ujian Tertutup bisa berjalan dengan baik dan lancar
5. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada moderator prelim lisan dan seminar hasil Dr. Ir Sri Mulatsih., M.Sc.Agr
6. Keluarga tercinta, orang tua, suami dan putra putri kami terimakasih atas segala doa, dukungan dan kesabarannya dalam membersamai penulis melalui proses pembelajaran ini.
7. Pimpinan Dekanat, Kaprodi Sekprodi dan rekan kerja di FEB UIN Syarif Hidayatullah khususnya Prodi Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan semangat.
8. Teman seperjuangan PWD Reguler 2020 (Mba Sri, Bu Ramla, Pak Syafiq, Pak Suliamin, Pak Fira, Pak Raja, Pak Hasbullah), dan seluruh rekan PWD lintas angkatan yang semoga tetap menjaga *social capital*-nya dimanapun berada.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Juli 2026
Rr Tini Anggraeni

DAFTAR ISI

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN	2
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA	2
RINGKASAN	3
SUMMARY	6
PRAKATA.....	12
DAFTAR TABEL	16
DAFTAR GAMBAR.....	17
DAFTAR LAMPIRAN	19
I PENDAHULUAN	20
1.1 Latar Belakang	20
1.2 Perumusan Masalah	30
1.3 Tujuan Penelitian.....	30
1.4 Manfaat Penelitian.....	31
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	32
1.6 Kebaruan	33
II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
2.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	33
2.1.1 Pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif	36
2.1.1.1. <i>Indikator-Indikator Pertumbuhan Ekonomi Inklusif</i>	39
2.1.1.2. <i>Pola pemetaan spasial Pembangunan Ekonomi Inklusif</i>	43
2.2 Teori Kesenjangan Pendapatan	44
2.3 Teori Keadilan Sosial	48
2.4 Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).....	51
2.4.1 Program Keluarga Harapan (PKH)	56
2.4.2. Program Indonesia Pintar	60
2.4.3 Zakat.....	61
2.5 Karakteristik Wilayah	62
2.6 Penelitian Terdahulu	64
2.7 Kerangka Pemikiran Dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Inklusif	75
III METODOLOGI PENELITIAN	76

	14
3.1 Jenis dan Sumber Data	76
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	77
3.3 Prosedur Analisis Data.....	79
3.4 Metode Analisis Data.....	79
3.4.1 Autokorelasi Spasial	79
3.4.2 Global Moran Indeks.....	80
3.4.3 Uji Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA)	83
3.4.4 Regresi Data Panel	83
3.4.5 Geographically Weighting Panel Regression (GWPR)	83
3.4.6 Analytical Neurotical Process (ANP).....	87
IV POLA PESEBARAN DAN EFEK SPASIAL INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DAN DANA JARING PENGAMAN SOSIAL	94
4.1 Uji Dependensi Spasial Pilar 1 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	94
4.1.2 Global Moran's I Pilar 1	94
4.1.3 Local Indicator Spatial Autocorrelation (LISA) Pilar	98
4.2 Uji Dependensi Spasial Pilar 2.....	105
4.2.1 Global Moran Index Pillar 2.....	105
4.2.2 Local Indicator Spatial Autocorrelation (LISA) Pillar 2	108
4.3 Uji Dependensi Spasial Pilar 3 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	115
4.3.1 Global Moran's I Pilar 3	115
4.3.2. Local Indicator Spatial Autocorrelation (LISA) Pillar 3	118
4.4 Uji Dependensi Spasial Program Keluarga Harapan	123
4.4.1 Global Moran Index Program Keluarga Harapan	124
4.4.2 Local Indicator Spatial Autocorrelation (LISA) PKH	126
4.5 Uji Dependensi Spasial Program Indonesia Pintar (PIP)	133
4.5.1 Global Moran Index Program Indonesia Pintar (PIP)	133
4.5.2 Local Indicator Spatial Autocorrelation (LISA) PIP	135
4.6 Uji Dependensi Spasial Zakat.....	141
4.6.1 Global Moran Index Zakat.....	141
4.6.2 Local Indicator Spatial Autocorrelation (LISA) Zakat.....	143
V ANALISIS KONTRIBUSI JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF	150
5.1. Uji Multikolinearitas	150
5.2 Pemodelan Regresi Panel	151

5.3 Uji Heterogenitas Spasial	15
5.4 Perbandingan Metode OLS dan GWPR	153
5.5 Pembobotan model GWPR.....	154
5.6 Pemodelan GWPR (Geographically Weighted Panel Regression)...	156
5.6.1 GWPR Pilar 1, Indeks Pertumbuhan Ekonomi	156
5.6.2 GWPR Pilar 2 Indeks Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	177
5.6.3 GWPR Pilar 3, Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan.....	199
5.6.4 GWPR Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	220
VI STRATEGI EFEKTIVITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF	244
6.1 Penyusunan Hierarki Bagan ANP.....	244
6.2 Analisis Hasil ANP untuk Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	248
6.3 Analisis Prioritas Aspek Kriteria Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 249	
6.4. Keterkaitan Analisis Kontribusi GWPR Dengan Strategi ANP	267
6.5 Model Tata Kelola Jaring Pengaman Sosial Berbasis Karakteristik Wilayah.....	270
VII KESIMPULAN DAN SARAN	275
7.1 Kesimpulan.....	275
7.2 Saran	276
DAFTAR PUSTAKA	279

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota/Kabupaten Jawa Barat	23
Tabel 2.1 Variabel, Sub variable, indicator dan Isue strategis Pembangunan Ekonomi Inklusif	41
Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu	63
Tabel 3.1 Variabel dan Sumber Data	75
Tabel 3.2 Definisi dan Operasional Variabel	76
Tabel 3.3 Prosedur Analisis Data	77
Tabel 3.4 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan	88
Tabel 3.5 Responden ANP	91
Tabel 5.1. Nilai VIF masing-masing variable	147
Tabel 5.2 Output Regresi Panel	147
Tabel 5.3 Output Heterogenitas Spasial	149
Tabel 5.4 Perbandingan R Square OLS dan GWPR	150
Tabel 5.5 Perbandingan Fungsi Pembobot Spasial	150
Tabel 5.6 Rentang Koefisien PKH Pilar 1	154
Tabel 5.7 Rentang Koefisien PIP Pilar 1	159
Tabel 5.8 Rentang Koefisien Zakat Pilar 1	164
Tabel 5.9 Signifikansi Variabel Karakteristik Wilayah Pilar 1	168
Tabel 5.10 Rentang Koefisien PKH Pilar 2	174
Tabel 5.11 Rentang Koefisien PIP Pilar 2	179
Tabel 5.12 Rentang Koefisien Zakat Pilar 2	184
Tabel 5.13 Signifikansi Variabel Karakteristik Wilayah Pilar 2	188
Tabel 5.14 Rentang Koefisien PKH Pilar 3	195
Tabel 5.15 Rentang Koefisien PIP Pilar 3	199
Tabel 5.16 Rentang Koefisien Zakat Pilar 3	205
Tabel 5.17 Signifikansi Variabel Karakteristik Wilayah Pilar 3	209
Tabel 5.18 Rentang Koefisien PKH IPEI	216
Tabel 5.19 Rentang Koefisien PIP IPEI	223
Tabel 5.20 Rentang Koefisien Zakat IPEI	228
Tabel 5.21 Signifikansi Variabel Karakteristik Wilayah IPEI	232

Tabel 6.1 Integrasi GWPR dan Perumusan Strategi ANP	240
Tabel 6.2 Kriteria, Alternatif dan Sub-Alternatif	243
Tabel 6.3 Hasil ANP	244
Tabel 6.4 Analisis Keterkaitan Program JPS Dengan Strategi ANP	264
Tabel 6.5 Analisis Keterkaitan Pilar IPEI Dengan Strategi ANP	265

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Jawa Barat	19
Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Kota/Kabupaten Jawa Barat	19
Gambar 1.3 Tingkat Ketimpangan Pendapatan Kota/Kab Prov Jawa Barat	20
Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota/Kab Prov Jawa Barat	24
Gambar 1.5 Grafik Realisasi Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat	27
Gambar 2.1 Pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif	36
Gambar 2.2 Indikator-Indikator Pembangunan Ekonomi Inklusif	43
Gambar 2.3 Perbandingan dua kurva Lorenz	46
Gambar 2.4 Circle of Justice	50
Gambar 2.5 Skema Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Pertumbuhan Ekonomi	54
Gambar 2.6 Identifikasi praktik jaring pengaman social	55
Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian	74
Gambar 3.1 Moran Scatterplot	80
Gambar 3.2 Tahapan Penelitian ANP	88
Gambar 4.1 Hasil Uji Global Moran's I Pilar 1	96
Gambar 4.2 Scatterplot LISA Pilar 1	97
Gambar 4.3 Cluster Significant Map LISA Pilar 1	102
Gambar 4.4 Hasil Uji Global Moran's I Pilar 2	104
Gambar 4.5 Scatter Plot LISA Pilar 2	106
Gambar 4.6 Cluster Significant Map LISA Pilar 2	111
Gambar 4.7. Uji Global Moran's I Pilar 3	113
Gambar 4.8. Scatter Plot LISA Pilar 3	115
Gambar 4.9 Cluster Significant Map LISA Pilar 3	118
Gambar 4.10. Uji Global Moran's I Program Keluarga Harapan	121
Gambar 4.11. Scatter Plot LISA Program Keluarga Harapan	125
Gambar 4.12. Cluster Significant Map LISA PKH	127

Gambar 4.13 Uji Global Moran's I Program Indonesia Pintar (PIP)	130
Gambar 4.14 Scatter Plot LISA Program Indonesia Pintar (PIP)	134
Gambar 4.15 Cluster Significant Map LISA Program Indonesia Pintar	136
Gambar 4.16 Uji Global Moran's I Zakat	138
Gambar 4.17 Scatter Plot Zakat	142
Gambar 4.18 Cluster Significant Map LISA Zakat	144
Gambar 5.1.a. Probability PKH to Pilar 1	153
Gambar 5.1.b Coefficient Parameter PKH to Pilar 1	153
Gambar 5.2.a. Probability PIP to Pilar 1	159
Gambar 5.2.b Coefficient Parameter PIP to Pilar 1	159
Gambar 5.3.a. Probability Zakat to Pilar 1	163
Gambar 5.3.b Coefficient Parameter Zakat to Pilar	163
Gambar 5.4.a. Probability PKH to Pilar 2	172
Gambar 5.4.b Coefficient Parameter PKH to Pilar 2	172
Gambar 5.5.a. Probability PIP to Pilar 2	178
Gambar 5.5.b Coefficient Parameter PIP to Pilar 2	178
Gambar 5.6.a. Probability Zakat to Pilar 2	183
Gambar 5.6.b Coefficient Parameter Zakat to Pilar 2	183
Gambar 5.7.a. Probability PKH to Pilar 3	194
Gambar 5.7.b Coefficient Parameter PKH to Pilar 3	194
Gambar 5.8.a. Probability PIP to Pilar 3	198
Gambar 5.8.b Coefficient Parameter PIP to Pilar 3	198
Gambar 5.9.a. Probability Zakat to Pilar 3	204
Gambar 5.9.b Coefficient Parameter Zakat to Pilar 3	204
Gambar 5.10.a. Probability PKH to IPEI	215
Gambar 5.10.b Coefficient Parameter PKH to IPEI	215
Gambar 5.11.a. Probability PIP to IPEI	221
Gambar 5.11.b Coefficient Parameter PIP to IPEI	221
Gambar 5.12.a. Probability Zakat to IPEI	227
Gambar 5.12.b Coefficient Parameter Zakat to IPEI	227
Gambar 6.1 Struktur ANP	242
Gambar 6.2 Output Strategi ANP	245
Gambar 6.3 Output Alternatif Strategi ANP	247
Gambar 6.4 Output Sub-Alternatif Strategi ANP	249

Gambar 6.5 Model Tata Kelola JPS Berbasis Karakteristik Wilayah

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.
DATA-DATA
EMPIRIS
LAMPIRAN 2.
OUTPUT LISA
LAMPIRAN 3.
HASIL GWPR
LAMPIRAN 4.
PETA SPASIAL
GWPR
LAMPIRAN 5..
HASIL OLAH
DATA ANP